



## Kinerja Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan di Kabupaten Subang

**Silvy Sondari Gadzali<sup>1</sup>**

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang  
[silvysondari.gadzali@gmail.com](mailto:silvysondari.gadzali@gmail.com)

**Nopy Nopylasari<sup>2</sup>**

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang  
[nopynopylasari@gmail.com](mailto:nopynopylasari@gmail.com)

### **Abstrak**

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Subang Merupakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Bersih. Dinas PUPR Kabupaten Subang memiliki tanggung jawab mengenai Program Pembangunan Sarana dan Prasarana air bersih pedesaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang tinggal di area pedesaan yang ada di Kabupaten Subang. Penulisan ini dilakukan secara deskriptif dan dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Kinerja PUPR dalam hal ini belum optimal dikarenakan unsur-unsur efektif, efisien, kualitas, ketepatan waktu dan produktivitas belum sepenuhnya berjalan dengan baik

**Kata kunci:** Kinerja, Air Bersih, Pedesaan

### **Abstract**

*Subang Regency Rural Clean Water Facilities and Infrastructure Development Program Is a Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 122 of 2015 concerning the Clean Water Supply System. The Subang Regency PUPR Service has responsibility for the Program for Development of Rural Clean Water Facilities and Infrastructure in the context of meeting the needs of clean water for people living in rural areas in Subang Regency. This writing was done descriptively and by using a qualitative research method approach. PUPR performance in this case has not been optimal because the elements of effectiveness, efficiency, quality, timeliness and productivity have not fully worked out well*

**Keywords:** Performance, Clean Water, Countryside

### **Pendahuluan**

Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat *profit oriented* dan *non profit oriented* yang di hasilkan selama satu periode waktu. Akhir – akhir ini kinerja telah menjadi terminology atau konsep yang sering di pakai orang dalam berbagi pembahasan dan pembicaraan, khususnya dalam kerangka mendorong keberhasilan organisasi atau sumber daya manusia. Kinerja



akan selalu menjadi isu aktual dalam organisasi karena apapun organisasinya kinerja merupakan pertanyaan kunci terhadap efektivitas atau keberhasilan organisasi.

Pembangunan di Kabupaten Subang yang perlu diperhatikan adalah menyangkut kesejahteraan rakyat, baik yang miskin maupun yang terbatas kemampuannya dalam teknologi dan keahlian. Pembangunan pada dasarnya merupakan kebutuhan bagi setiap masyarakat, bangsa dan negara karena pembangunan mengandung makna sebagai suatu perubahan untuk menjadi keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan-perubahan yang dimaksud meliputi perubahan ekonomi, politik, sosial budaya dan perubahan-perubahan dibidang kehidupan masyarakat lainnya. Salah satu perubahan yang sangat penting dalam pembangunan adalah pengurangan angka kemiskinan. Kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam permasalahan seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, penyediaan air bersih, sanitasi dan sebagainya.

Dalam konteks organisasi pemerintah daerah, kinerja adalah suatu ukuran prestasi atau hasil dalam mengelola dan menjalankan suatu organisasi dimana berhubungan dengan segala hal yang akan datang, sedang dan telah dilakukan organisasi tersebut dalam kurun waktu tertentu. Pengukuran kinerja organisasi pemerintah daerah penting dilakukan karena berguna sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja organisasi tersebut agar lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Penilaian kinerja organisasi pada pemerintah daerah sangat penting untuk dilakukan, agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penilaian kinerja tersebut digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja sebuah organisasi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat

Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum, disebutkan bahwa Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.

Dengan demikian kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak-hak dasar manusia, seperti air bersih/minum, memotivasi Pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan dan pengembangan Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan khususnya bagi masyarakat perdesaan yang notabene merupakan masyarakat dengan tingkat pelayanan Penyediaan Air Bersih/Minum terendah.

Sehubungan dengan usaha penciptaan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah Kabupaten Subang melalui Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Subang memberikan pelayanan air bersih/minum bagi masyarakat miskin khususnya dan masyarakat yang susah mengakses air umumnya, yang ditandai dengan penyediaan air bersih/minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang dimulai sejak tahun 2007 sampai sekarang. (Petunjuk Teknis Sub bidang Air Bersih,2007:1)

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Subang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Subang, dimana Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi



kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.

Khusus untuk sektor air bersih/minum sederhana, karakteristik daerah dan ketersediaan sumber daya alam telah menghasilkan kondisi pelayanan air bersih/minum yang berbeda, baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah perdesaan. Dengan mempertimbangkan keberlanjutan prasarana air bersih/minum yang dibangun, yang diarahkan untuk dapat dikelola oleh masyarakat pengguna itu sendiri, maka prasarana air bersih/minum haruslah prasarana yang ditinjau dari pelayanannya bersifat komunal, dan ditinjau dari fisik prasarananya bersifat mudah dan ekonomis dalam pembangunan, operasional dan pemeliharaan serta pengelolannya. Memperhatikan bahwa prioritas lokasi-lokasi yang akan menjadi lingkup pelaksanaan adalah desa-desa yang belum pernah mendapat pelayanan air bersih/minum secara formal (pelayanan oleh perusahaan daerah air minum setempat) sehingga pemenuhan kebutuhan air bersih/minum dilakukan secara individu rumah tangga atau swadaya masyarakat, maka perlu diberikan acuan petunjuk bagi para pelaksana program, baik untuk aparat pemerintah terkait maupun untuk masyarakat sebagai aktor utama pelaksanaan program, sehingga diperoleh arah, pengertian dan pengetahuan yang sama dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. (Panduan Pengembangan Air bersih/minum, 2007:6)

Tabel 1.1  
 Data Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih

| Tahun | Lokasi Usulan | Alokasi Kegiatan dalam DPPA | Realisasi Kegiatan | Masalah  |
|-------|---------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 2018  | 35            | 30                          | 27                 | 1.Tidak tersedianya lahan (Hibah Tanah) untuk pembangunan Broncaftering dan Reservoir<br>2.Alokasi anggaran yang masih sangat terbatas dan minim<br>3.Waktu Pengesahan Pergeseran Anggaran yang mendekati akhir tahun sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan |
| 2019  | 32            | 24                          | 24                 | 1.Tidak tersedianya lahan (Hibah Tanah) untuk pembangunan Broncaftering dan Reservoir<br>2.Alokasi anggaran yang masih sangat terbatas dan minim   |

|      |    |    |   |   |
|------|----|----|---|---|
| 2020 | 37 | 29 | 1 | 1.Tidak tersedianya lahan (Hibah Tanah) untuk pembangunan Broncaftering dan Reservoir<br>2.Alokasi anggaran yang masih sangat terbatas dan minim<br>3.Anggaran dialihkan untuk penanganan covid-19 sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan |
|------|----|----|---|---|

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Subang,2021

Berdasarkan tabel Tabel 1.1 diketahui bahwa data pembangunan sarana dan prasarana air bersih melalui Usulan Musrenbang dan Proposal yang masuk Dinas PUPR masih belum optimal dilaksanakan terlihat pada tiap tahun lokasi usulan proposal yang masuk tidak semua mengalami pengesahan anggaran serta realisasi kegiatan pun belum sesuai dengan proposal dan pengesahan anggaran.

Tabel 1.2  
 Sistem dan Teknologi yang digunakan

| Tahun | Sistem yang digunakan    | Tekhnologi yang digunakan |
|-------|--------------------------|---------------------------|
| 2018  | Pengeboran dan Gravitasi | Screen dan Gravel Pack    |
| 2019  | Pengeboran dan Gravitasi | Screen dan Gravel Pack    |
| 2020  | Pengeboran dan Gravitasi | Screen dan Gravel Pack    |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Subang,2021

Pada tabel 1.2 diketahui bahwa Sistem dan Teknologi yang digunakan terlihat dari tahun 2018 sd 2020 tidak mengalami perubahan yaitu sistem yang digunakan adalah pengeboran dan gravitasi serta tekonologi yang digunakan adalah Screen dan Gravel Pack.

Memperhatikan tabel-tabel tersebut di atas, untuk memenuhi tugas dan fungsinya sebagai fasilitator pembangunan, Pemerintah wajib menerbitkan petunjuk teknis yang akan menjadi acuan bagi semua pihak terkait. Untuk sektor air bersih/minum, disusun Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan untuk jenis-jenis yang telah disesuaikan dengan lingkup program.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah tidak memadainya prasarana dan sarana air bersih/minum dan sanitasi, khususnya di pedesaan dan daerah pinggiran kota berpengaruh buruk pada kondisi kesehatan dan lingkungan yang memiliki dampak lanjutan terhadap tingkat perekonomian keluarga. Penggunaan air yang utama dan sangat vital bagi kehidupan adalah sebagai air bersih/minum. Hal ini terutama untuk mencukupi kebutuhan air di dalam tubuh manusia itu sendiri. Pengertian Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Sedangkan air minum adalah air yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.



Terlebih lagi saat ini penggunaan air bersih selama ini disebut sebagai bagian penting pengendalian risiko penyebaran virus, termasuk COVID-19. WHO pun dalam rekomendasinya pada April 2020 menganjurkan antara lain tersedianya air untuk mencuci tangan dan aktivitas sanitasi lainnya. Pandemi COVID-19 menambah tantangan baru bagi peradaban karena penerapan protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini membutuhkan ketersediaan air bersih yang cukup di semua lapisan masyarakat. Pengelolaan air tanah dan air baku juga menghadapi tantangan antara lain tingginya pertumbuhan penduduk, eksploitasi air tanah dan pencemaran air pada wilayah sungai di Kabupaten Subang.

Salah satu peran pemerintah untuk memberikan akses air bersih dan sanitasi adalah dengan menjalankan Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan yang telah memberikan akses fasilitas air bersih dan akses sanitasi kepada penduduk. Program ini juga ikut serta dalam program edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat untuk mencapai keberlangsungan jangka panjang. Diketahui bahwa Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan belum optimal, hal ini dapat dilihat pada permasalahan sebagai berikut, seperti : Efektif, pada tahun 2019 dari target 32 lokasi pembangunan sarana air bersih perdesaan hanya terealisasi 24 lokasi atau 75% (tabel 1.1), Produktivitas teknologi yang digunakan untuk proses pengolahan kurang sesuai dengan kondisi air baku yang kualitasnya cenderung makin menurun (tabel 1.2)

### **Kerangka Teori**

Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara terarah dan sistematis Informasi mengenai kinerja ini pula sangat penting guna menciptakan tekanan bagi pejabat penyelenggara pelayanan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam organisasi. Dengan demikian, maka penilaian dengan mudah dapat dilakukan dan dorongan untuk memperbaiki kinerja bisa diciptakan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Mengukur kinerja organisasi publik, sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik, seperti yang dijelaskan Dwiyanto (2006:50-51) menggunakan beberapa kriteria untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi publik antara lain sebagai berikut :

1. Produktivitas; Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami secara umum sebagai rasio antara *input* dengan *output*.
2. Kualitas Layanan; Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi publik. Hal ini disebabkan adanya pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima. Dengan demikian kualitas layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.
3. *Responsivitas*; Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan



mengembangkan program-program pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. *Responsibilitas*; Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun *implisit*. Oleh sebab itu itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.
5. *Akuntabilitas*; Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tersebut konsisten dengan kehendak masyarakat banyak

Adapun Kumorotomo (2002:50), menguraikan untuk mengukur kinerja organisasi yaitu dengan cara :

1. Efisiensi; Efisiensi menyangkut perimbangan tentang keberhasilan organisasi publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis.
2. Efektivitas; Apakah tujuan dari didirikannya organisasi publik tersebut tercapai. Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan.
3. Keadilan; Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi publik.
4. Daya Tanggap; Organisasi publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi kriteria daya tanggap ini.

Pendapat Kumorotomo tersebut menurut peneliti menggambarkan bahwa pengukuran kinerja organisasi berkaitan dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan yang didukung oleh unsur efisiensi, efektivitas, keadilan dan daya tanggap.

Selanjutnya Prawirosentono (2009:27) mengukur kinerja suatu organisasi adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas dan Efisiensi; Efektivitas adalah bila tujuan organisasi tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.
2. Efisiensi berkaitan dengan jumlah pengorbanan yang dikeluarkan dalam upaya mencapai tujuan.
3. Otoritas dan Tanggung jawab (*Authority and Responsibility*); Otoritas adalah wewenang yang dimiliki seseorang untuk memerintah orang lain agar melaksanakan tugasnya dalam suatu organisasi.



4. Wewenang tersebut mempunyai batas-batas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
5. Tanggung jawab adalah bagian yang tidak terpisahkan atau sebagai akibat dari kepemilikan wewenang tersebut. Dengan perkataan lain, bila ada wewenang berarti dengan sendirinya muncul tanggung jawab.
6. Disiplin (*Dicipline*) adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku.
7. Inisiatif (*initiative*); Inisiatif berkaitan dengan daya pikir, kreativitas dalam bentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi.

Berdasarkan pernyataan Prawirosentono tersebut peneliti menganalisis bahwa manajemen puncak harus mampu mendapatkan hasil penilaian mengenai kinerja organisasi secara cepat dan komperhensif secara laporan dilihat dari efektivitas, efisiensi, otoritas, wewenang, tanggung jawab, disiplin dan inisiatif. Selanjutnya Moeheriono (2010:80) mengemukakan mengenai ukuran kinerja organisasi yaitu :

1. Efektif, indikator ini mengukur derajat kesesuaian output yang dihasilkan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan.
2. Efisien, indikator ini mengukur derajat kesesuaian proses menghasilkan output dengan menggunakan biaya serendah mungkin.
3. Kualitas, indikator ini mengukur derajat kesesuaian antara kesesuaian produk yang dihasilkan dengan kebutuhan dan harapan.
4. Ketepatan waktu, indikator ini mengukur apakah pekerjaan telah diselesaikan secara benar dan tepat waktu.
5. Produktivitas, indikator ini mengukur tingkat produktivitas suatu organisasi.

Pengukuran kinerja organisasi publik tidak cukup hanya dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang melekat pada organisasi publik tersebut, penilaian kinerja dari sisi ini menjadi sangat penting karena organisasi publik seringkali memiliki kewenangan monopolis sehingga para perngguna jasa tidak memiliki alternatif sumber pelayanan.

Dari berbagai ukuran-ukuran kinerja organisasi menurut para ahli di atas, dalam penelitian peneliti yaitu kinerja Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Di Kabupaten Subang, peneliti memilih ukuran kinerja organisasi menurut Moeheriono (2010:80), dimana ukuran-ukuran organisasi tersebut terdapat dimensi-dimensi yang mendukung kinerja organisasi seperti efektif, efisien, kualitas, ketepatan waktu dan produktivitas.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berbasis pada informasi/kenyataan yang terjadi di lapangan. Adapun prosedur-prosedur pada pendekatan kualitatif yaitu pengambilan sampel secara sengaja, pengumpulan data terbuka, analisis teks atau gambar, penyajian informasi dalam bentuk gambar dan tabel, serta interpretasi pribadi atas temuan-temuan. Langkah-langkah untuk pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam / mencatat informasi



Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran variabel yang diteliti. Dalam hal penelitian ini peneliti mengungkapkan penelitian kualitatif dengan penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan sebenarnya dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena apa yang terjadi yaitu kinerja Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Di Kabupaten Subang., *Denzin dan Lincoln* (Moleong, 2005:4) menyatakan bahwa metodologi kualitatif penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Adapun tujuan utama menggunakan penelitian kualitatif adalah mengembangkan pengertian, konsep-konsep yang pada akhirnya memperoleh gambaran yang kemudian diarahkan pada deskripsi terhadap kinerja Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Di Kabupaten Subang.

### **Hasil dan Pembahasan**

Pembangunan kesejahteraan masyarakat mengenai Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku hidup bersih dan sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan sehat, memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga kelompok dan masyarakat.

Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan sangat diperlukan dalam mendekatkan upaya promotif dan preventif kepada masyarakat, utamanya terkait dengan upaya peningkatan status kesehatan dan pola hidup sehat masyarakat serta upaya kesehatan masyarakat di masa yang akan datang. Dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat secara umum. Permasalahan Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan terlihat dari kurangnya kinerja petugas dalam penyediaan air bersih yang membuat masyarakat salah mengartikan tentang program tersebut.

### **Efektif**

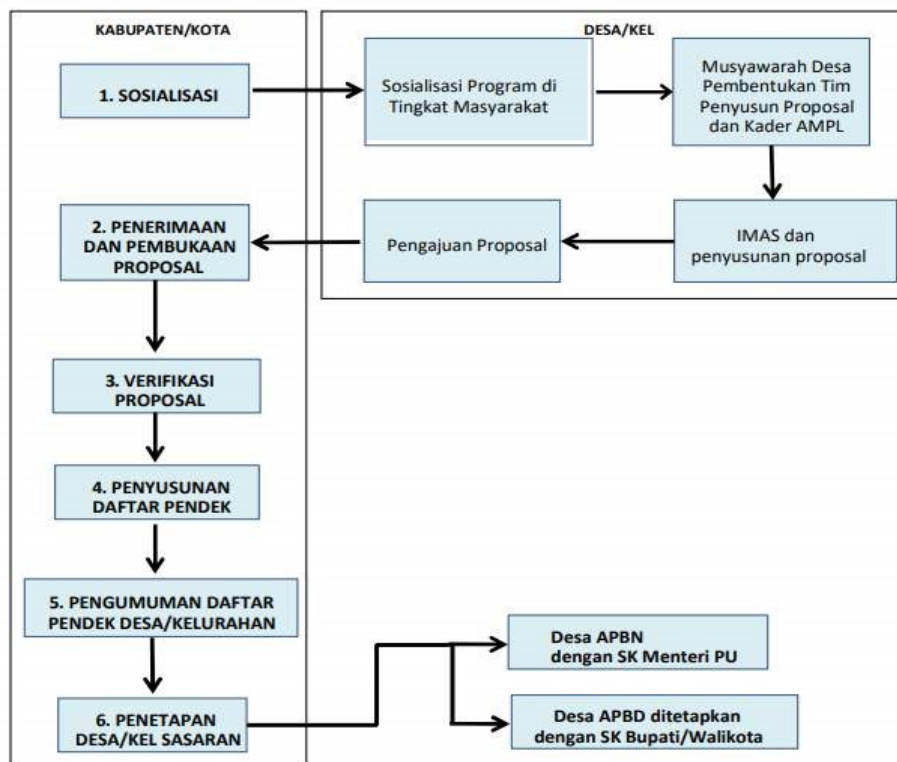
Efektif atau tidaknya suatu sasaran program sangat tergantung pada proses pelaksanaan program tersebut dan hasil yang di harapkan dari program yang telah ditentukan. Menurut Moehariono (2010:77) berkenaan dengan bagaimana kesesuaian program - program yang di rancang oleh pengelola kepada kelompok sasaran.

Efektif berkaitan dengan pencapaian tujuan suatu program dinilai dari keberhasilan suatu program yang berlangsung, keberhasilan juga ditunjang oleh capaian target yang ditentukan oleh organisasi untuk mengevaluasi kegiatan/program yang akan dilaksanakan periode berikutnya. Adapun sasaran program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Di Kabupaten Subang dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 4.4



### Bagan Sasaran Pemilihan Lokasi Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Di Kabupaten Subang



Sumber : Dinas PUPR Kab Subang 2021

Data diatas menunjukkan bahwa terdapat alur pelaksanaan program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Di Kabupaten Subang, program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Di Kabupaten Subang telah optimal dilihat dari rangkaian atau tahapan pelaksanaan program yang sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, mulai dari survey lokasi, hingga pembangunan yang sudah diuji kelayakannya oleh pihak Dinas.

ketentuan - ketentuan pelaksanaan kegiatan dilandasi oleh peraturan Pemenkes No 75 Tahun 2014 tentang Kesehatan yang merupakan bagian yang mendukung program kesehatan yang dilaksanakan oleh Bidang cipta karya pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Subang. Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan ini di sesuaikan dengan kondisi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan di latarbelakangi karena sumberdaya manusia yang menjadi penerima program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan dinilai masih kurang memahami mengenai pentingnya program ini dalam kultur prilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat.

Kinerja program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan tersebut tidak hanya melihat dari tercapainya atau tidaknya suatu program melainkan dampak yang dirasakan dari program tersebut, lebih dari itu mengetahui apa yang menyebabkan beberapa masyarakat tidak memahami dan parahnya tidak merasakan program ini permasalahan apa yang di hadapi oleh masyarakat sehingga program ini sulit terlaksanakan. Adapun untuk pelaksanaana program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan dinilai sudah efektif karena pihak



pengelola program sudah menargetkan ke semua masyarakat terkait.

Menurut Moeheriono (2010:80) kinerja pada sisi lain, menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil sesuai dengan ketentuan. Dalam penelitian ini, kinerja suatu program menjadi tujuan dari program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Di Kabupaten Subang dalam memperbaiki taraf kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten Subang. Hasil penelitian pada indikator ini menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini terlihat dari beberapa informasi dari beberapa informan, bahwa pelaksanaan program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Di Kabupaten Subang dalam memperbaiki taraf kesehatan masyarakat telah dilakukan seoptimal mungkin oleh Pihak terkait, dan telah melakukan berbagai cara agar program tersebut terlaksana sesuai dengan kondisi yang ada.

### **Efisien**

Dalam konsep pelayanan publik, dikemukakan bahwa efisien menjadi salah satu syarat terlaksananya pelayanan publik yang berkualitas. Demikian juga kualitas dari aparatur sebuah instansi pelayanan publik dapat dilihat dari seberapa besar pencapaian sebuah instansi terhadap kualitas pelayanan publiknya jika kita asumsikan bahwa peningkatan keduanya akan selalu searah seperti yang telah dikemukakan di atas.

Hasil kinerja pegawai suatu instansi pemerintah dapat dilihat dari efisiensi dalam proses penyelesaian pekerjaan, bagaimana kinerja aparat dalam mengupayakan pelayanan publik yang berkualitas. Efisiensi merupakan penyelesaian tugas pekerjaan atau pencapaian tingkat output yang didasari pada batas waktu yang ditentukan. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa setiap pelaksana tugas bidang memiliki tanggung jawab menyelesaikan setiap tugas dengan tepat waktu, tidak menunda sebagaimana tugas yang dibebankan tanpa harus menunggu pada suatu kesempatan lain.

Efisiensi berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas kerja dalam pelaksanaan program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan, bahwasanya efisiensi yang dilakukan masih bersifat standar dengan sistem yang digunakan adalah pengeboran dan gravitasi serta teknologi yang digunakan adalah Screen dan Gravel Pack pada saat pelaksanaan program. Efisiensi disini berkaitan dengan penghematan anggaran dalam pelaksanaan program pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan, efisiensi anggaran di tahun 2019 dalam pembangunan sarana dan prasarana air bersih di beberapa desa di Kabupaten Subang cukup rampung dan mencapai target dengan rasio 75% capaian.

Efisiensi pembangunan sarana dan prasarana air bersih di beberapa desa cukup merata dan rampung selesai, adapun beberapa masyarakat sangat mengapresiasi keberlangsungan program tersebut, terlebih di wilayah Subang bagian utara yang notabene kekurangan pasokan air bersih seperti Kecamatan Blanakan, Pamanukan, Legonkulon, Pusakajaya dan Kecamatan Ciasem.

Pada dimensi Efisien berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan observasi pada indikator efisien dapat dikatakan optimal. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil jawaban informan bahwa terdapat efisiensi dalam pengelolaan anggaran pelaksanaan program dengan capaian target sudah mencapai



hasil yang baik. Melihat hal tersebut, efisiensi yang dimiliki oleh Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Subang terhadap program pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan dinilai sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Moeheriono (2010:80), dimana menurut Moeheriono (2010:88), mengukur kinerja organisasi suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan dalam hal efisiensi, baik itu anggaran maupun efisiensi waktu. Artinya segala bentuk rencana lebih terorganisir dan lebih mudah dioperasikan dengan memperhatikan input dan output yang dihasilkan.

### **Kualitas**

Kualitas merupakan hal yang penting dalam menjelaskan kinerja suatu organisasi yang memberikan pelayanan. Banyak yang mengatakan tidak baik mengenai pelayanan yang ada, karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas kerja yang ada. Sistem kerja yang baik dan besarnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu organisasi secara efektif didayagunakan kepada pelayanan masyarakat. Kemampuan dan sumber daya yang baik dari para pegawai sangat dibutuhkan agar orientasi pelaksanaan program tercapai.

Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat sering kali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pekerjaan sering kali dapat diperoleh dari media masa atau diskusi publik. Akibat akses terhadap informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas pekerjaan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja organisasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.

Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Subang dalam melaksanakan program telah menyiapkan fasilitas fisik yang tertuang dalam Tupoksi yang tersedia pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Subang. Bahwa pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Subang sudah memiliki Standar kualitas kerja yang jelas, hal itu tertuang dalam tupoksi Bidang Cipta karya dalam mengupayakan pemerataan pasokan air bersih melalui program pembangunan sarana dan prasarana air bersih di wilayah pedesaan di Kabupaten Subang.

Aspek kualitas pekerjaan yang diberikan berupa pemerataan pembangunan di lokasi-lokasi rawan kekurangan air bersih dengan menggunakan skala prioritas dalam proses pengerjaannya. maka kualitas pekerjaan yang diberikan oleh Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih belum optimal dikarenakan ada beberapa desa yang masih belum merasakan dampak dari program pembangunan sarana dan prasarana air bersih di pedesaan yang ada di Kabupaten Subang.

### **Ketepatan Waktu**

Ketepatan waktu merupakan penggunaan masa kerja yang disesuaikan dengan kebijakan organisasi agar pekerjaan selesai pada waktu yang telah ditetapkan. Menurut Gibson dalam tangkilisan (65:2004) tepat waktu memiliki makna bahwa dalam ketepatan waktu terdapat standard dan SOP yang ditentukan dalam



pelaksanaannya.

Standar waktu yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaan dalam suatu proses kinerja merupakan hal yang penting dalam proses meningkatkan kinerja organisasi, karena dengan menyelesaikan tepat waktu maka masyarakat akan merasa puas. Tetapi tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Proses program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan di lingkup Kabupaten, Kecamatan hingga Desa sudah ada SOP nya, dan SOP tersebut mengacu kepada standar maupun tata naskah Kesehatan Masyarakat yang dikeluarkan oleh pihak Dinas PUPR dalam pembangunan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan.

Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan pembangunan yang telah direncanakan rampung di tahun 2020 nyatanya terhambat oleh pandemic yang dimana terjadi refocusing anggaran dan pembatasan skala besar dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur salah satunya ialah Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan yang ada di Kabupaten Subang.

Faktor penghambat pelaksanaan program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan ialah faktor kultur dan budaya yang di hadapi oleh masyarakat di beberapa desa, meskipun pemerintah berusaha memperbaiki taraf kesehatan masyarakat tapi tidak dengan kultur dan budayanya itu tidak dapat berjalan dengan baik. Dengan kata lain Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan dalam memperbaiki taraf kesehatan masyarakat seberapa jauh ketepatan waktu dari pelaksanaan program ini masih ada kendala atau masih belum berjalan dengan lancar.

Mengenai konsepsi ketepatan waktu perihal standar pelaksanaan dan SOP yang dilaksanakan pihak pelaksana, jika dikaitkan dengan teori menurut Moehariono (2010:80), seharusnya ketepatan waktu dibuat rancangan seefektif mungkin, salah satunya yaitu dengan membuat perencanaan dan penjadwalan secara sistematis agar ketepatan waktu mengenai program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan sesuai target yang ditentukan dan cepat dirasakan oleh masyarakat.

### **Produktivitas**

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan, produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output. Konsep produktivitas kemudian dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office (GAO)* mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. Menurut Dwiyanto (2012;50-51) indikator dari produktivitas antara lain :

1. Sikap Aparat, dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari kesediaan dan inisiatif para pegawai untuk bekerja secara efektif dan efisien.
2. Kemampuan, diharapkan aparatur memiliki keahlian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. Misalnya untuk pekerjaan yang berkenaan dengan administrasi, maka pegawai yang diharapkan dapat melaksanakan tugas tersebut adalah pegawai yang memiliki dasar pendidikan administrasi juga.

Agar tujuan program tercapai dan pelaksanaan program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan sesuai dengan pedoman dan rencana



kegiatan yang telah disusun berdasarkan kebutuhan dan harapan masyarakat atau sasaran.

Perencanaan awal berkaitan dengan Tupoksi yang ada pada Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Cipta Karya tentang Tupoksi pada kegiatan akan penyediaan air bersih yang ada di Kabupaten Subang. Mahsun (2006:25) berpendapat bahwa capaian tujuan kinerja (*performance*) organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planing* suatu organisasi. Dianalisis sebagai *Top Management* dalam suatu organisasi Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR Kabupaten Subang selalu memberi arahan kepada pelaksana program agar memiliki perencanaan yang matang mengenai rencana apa yang akan dilakukan guna pencapaian realisasi program dapat berjalan secara optimal.

Menurut Mahmudi (2005:43) tahapan capaian tujuan akan produktivitas pencapaian target itu dilihat dari peningkatan mutu pegawai melalui pembagian *Job Description* kepada setiap pegawai guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi mekanisme kinerja dalam mendorong percepatan pencapaian realisasi program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan yang ada di wilayah Kabupaten Subang.

Ketidak optimalan capaian organisasi dilihat dari pelaksanaannya yang dinilai kurang cepat juga disebabkan oleh faktor lain di antaranya keterbatasan SDM yang ada di lapangan yang menyebabkan produktivitas kinerja dinilai rendah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang belum optimal dilihat dari pembagian Tugas pada petugas di lapangan yang dinilai masih terbatas, selain itu masalah lamban nya pekerjaan program yang diakibatkan teknologi yang digunakan untuk pelaksanaan program dalam proses pengolahan kurang sesuai dengan kondisi air baku yang kualitasnya cenderung makin menurun di berbagai desa yang ada di Kabupaten Subang.

## Kesimpulan

Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dimensi efektif mengenai Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Di Kabupaten Subang dinilai optimal terlihat dari pelaksanaan program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Di Kabupaten Subang sudah terealisasi di angka 87% dan tujuan utama program ini ialah memperbaiki taraf kesehatan masyarakat yang telah dilakukan seoptimal mungkin oleh Pihak terkait, dan telah melakukan berbagai cara agar program tersebut terlaksana sesuai dengan kondisi yang ada.
2. Dimensi efisien mengenai Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Di Kabupaten Subang dinilai optimal dilihat dari efisiensi dalam pengelolaan anggaran pelaksanaan program yang dinilai cukup baik sehingga capaian target sudah mencapai hasil yang optimal. Melihat hal tersebut, efisiensi yang dimiliki oleh Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Subang terhadap program pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan dinilai mendukung keberhasilan program



- Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Di Kabupaten Subang.
3. Dimensi kualitas mengenai Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Di Kabupaten Subang dinilai belum optimal terlihat dari kualitas pekerjaan yang diberikan oleh Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih belum optimal dikarenakan ada beberapa desa yang masih belum merasakan dampak dari program pembangunan sarana dan prasarana air bersih di pedesaan yang ada di Kabupaten Subang.
  4. Dimensi ketepatan waktu mengenai Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Di Kabupaten Subang dinilai belum optimal terlihat dari masih belum meratanya pembangunan serta terhambatnya pembangunan program oleh pandemi Covid19 yang mengakibatkan waktu pelaksanaan yang direncanakan sebelumnya tidak tercapai, terutama pembangunan di 2020 dan 2021.
  5. Dimensi Produktivitas mengenai Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Di Kabupaten Subang juga dinilai belum optimal dilihat dari pembagian Tugas pada petugas di lapangan yang dinilai masih terbatas, selain itu masalah lamban nya pekerjaan program yang diakibatkan teknologi yang digunakan untuk pelaksanaan program dalam proses pengolahan kurang sesuai dengan kondisi air baku yang kualitasnya cenderung makin menurun di berbagai desa yang ada di Kabupaten Subang.

## Referensi

- Dwiyanto, Agus. 2006. *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Fisipol UGM.
- Moehariono. 2010. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Moleong, Lexy,J,MA. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta. Gramedia
- Pasolong, harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: alfabeta.
- Sedermayayanti. 2006. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas kerja*, Bandung Mandar maju.
- Silalahi, Uber. 2011. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Reflika Aditama.
- Soewarno, Handyaningrat. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*: 1990. hal 15
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Alfa beta, Bandung.
- Sondang P. Siagian. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Suharno, 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta : Ombak Dua.
- Wibowo. 2010. *Manajemen Kinerja*. Rajawali Press. Jakarta.